

ABSTRAK

Realisasi bantuan modal koperasi dari Pemkab pada Perda No. 10 tahun 2017 berdasarkan data jumlah koperasi di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 238 unit, bahwa wilayah ini sebenarnya secara *de facto* seperti pendukung program pemberdayaan perekonomian nasional melalui pendirian koperasi, namun berdasarkan penelitian dan data yang dihimpun peneliti belum pernah mendukung program perekonomian koperasi dengan memberikan modal atau bantuan diwilayahnya, padahal dalam pasal 49 ayat 1 poin a dalam pengembangan dan kemajuan koperasi diperbolehkan untuk memberikan atau menambahkan modal dari pemerintah daerah.

Atas dasar diatas maka peneliti ingin mengetahui Implementasi Kebijakan Pemkab Tasikmalaya melalui kajian teori kebijakan Merilee S Grindle dan Ekonomi Politik Pendekatan Keyenesian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif. Penentuan responden digunakan metode *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling* sesuai dengan kriteria fokus penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data menggunakan teknis Miles dan Haberman. Uji validitas data yang diperoleh menggunakan triangulasi sumber yakni peneliti membandingkan hasil wawancara langsung dengan hasil studi dokumentasi.

Hasil Penelitian ini Bahwa koperasi di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 162 unit dari Tahun 2018-2023 belum pernah sepeserpun mendapatkan modal dana, padahal melalui Perda Nomor 10 Tahun 2017 pasal 49 ayat 1 poin a bahwa koperasi berhak mendapatkan bantuan dana. Adapun alasan belum terimplementasi Perda Nomor 10 tahun 2017 dalam pasal 49 yat 1 poin a mengenai bantuan modal koperasi dari Pemkab Tasikmalaya belum terimplementasi dengan alasan yakni Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) masih minimum, fokus pembangunan Pemkab yakni kesehatan, Pendidikan dan Imfrastruktur, dan kurangnya keberpihakan pemangku kebijakan (Bupati) dampaknya dalam Perda ini tidak ada sanksi terlampir sehingga ini tidak menjadi hal wajib, kembali pada prinsip koperasi bersifat kemandirian modal utamanya yaitu dari anggota, dan sumber daya manusia koperasi Kab. Tasikmalaya yang belum siap berubah secara signifikan.

Kata Kunci: Kebijakan, Ekonomi Politik, Koperasi.